



Available online at:
<http://unikastpaulus.ac.id/jurnal/index.php/jrt/>
Randang Tana: Jurnal Pengabdian Masyarakat
E-ISSN: 2622-0636
Volume 9, No 1, Januari 2026 (1-12)
DOI: 10.36928/jrt.v8i2.3015

Pendampingan Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah di SMPN 13 Borong, Manggarai Timur

Maksimilianus Jemali^{1*}, Rudolof Ngalu²

¹²Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng

*email: lianjemali28@gmail.com

Abstrak

Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) merupakan instrumen strategis dalam menjamin mutu pendidikan dan keberlanjutan visi institusi. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan mendampingi pihak SMPN 13 Borong, Manggarai Timur, dalam menyusun dokumen RPS yang komprehensif, terukur, dan berbasis data. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah pendampingan partisipatif melalui tahapan analisis situasional, lokakarya (*workshop*) penyusunan draf RPS, serta evaluasi dokumen bersama *stakeholder* sekolah. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman manajerial kepala sekolah, guru, dan komite dalam memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) sekolah. Implikasi kegiatan ini adalah terciptanya tata kelola sekolah yang lebih terstruktur dan akuntabel, yang diharapkan dapat menjadi panduan dalam mengalokasikan sumber daya sekolah secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan layanan Pendidikan.

Kata Kunci: Pendampingan, Rencana Pengembangan Sekolah (RPS), Tata Kelola Sekolah, SMPN 13 Borong.

Assistance in Formulating School Development Plans at SMPN 13 Borong, East Manggarai

Abstract

The formulation of a School Development Plan (SDP) serves as a strategic instrument to ensure educational quality and the sustainability of institutional visions. This community service project aims to assist school authorities at SMPN 13 Borong, East Manggarai, in developing comprehensive, measurable, and data-driven SDP documents. The method employed in this project is participatory assistance, encompassing stages of situational analysis, SDP drafting workshops, and document evaluation involving school stakeholders. The results indicate an improvement in the managerial understanding of the principal, teachers, and school committee in mapping the school's strengths, weaknesses, opportunities, and threats (SWOT). The implication of this activity is the establishment of a more structured and accountable school governance system, which is expected to serve as a guide for effective resource allocation to enhance the quality of learning and educational services.

Keywords: Assistance, School Development Plan (SDP), School Governance, SMPN 13 Borong

PENDAHULUAN

Salah satu pilar penting dalam keberhasilan proses pendidikan tingkat menengah (seperti SMPN 13 Borong) adalah ketersediaan guru-guru berkualitas dan profesional. Standar profesionalitas guru tertuang dalam UU No.14 tahun 2005 pasal 1 ayat 1. Di dalam UU tersebut dideskripsikan tentang hakikat guru sebagai pendidik profesional yang memiliki tugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Menjadi guru membutuhkan keahlian khusus yang terus diperbaharui sesuai dengan konteks sekolah dan kurikulum pembelajaran. Oleh karena itu sangat dibutuhkan analisis atau kajian tentang kuantitas dan kualitas guru dan tenaga kependidikan yang kemudian dilanjutkan dengan upaya peningkatan mutu guru dan mutu pendidikan. Upaya peningkatan mutu guru dan mutu pendidikan berdampak pada guru bermutu dan pendidikan bermutu.

Peserta didik merupakan sasaran utama dalam proses pendidikan. Hal itu sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dan menjadi landasan kegiatan pelaksanaan program pendidikan. Tujuan dari pendidikan nasional ini berdampak pada upaya pembentukan siswa secara holistik yang melibatkan pengembangan aspek akademis, karakter, dan keterampilan. Para siswa dituntut untuk menguasai materi pembelajaran, mengembangkan karakter dan etika, pengembangan kewirausahaan, teknologi dan literasi digital, kesehatan lingkungan, dan ekstra-kurikuler.

Guna mensukseskan dan mengembangkan Kurikulum tersebut telah tersusun Rencana Kerja Sekolah. Rencana Kerja tersebut adalah Rencana Kerja Jangka menengah yang merupakan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dalam kurun waktu lima tahun sebagai upaya penjabaran dari visi dan misi sekolah. Dengan tersusunnya Rencana Pengembangan Sekolah SDI Wae Moto ini diharapkan kualitas guru serta mutu pendidikan dapat dicapai dan berkembang sesuai

dengan Sumber Daya Manusia siswa ke arah yang lebih baik, seperti apa yang diamanatkan dalam UUD 1945 umumnya dan Undang-Undang No.20 Tahun 2003 bab II pasal 2 dan 3, serta Standar Nasional Pendidikan pada khususnya.

Pendidikan merupakan ranah pembebasan dari ketertinggalan sekaligus pengendali kemajuan-kemajuan. Salah seorang pedagog pendidikan, Paulo Freire pernah mengungkapkan bahwa pembebasan merupakan substansi dan orientasi ultim pendidikan (Freire, 2004). Hal ini sejalan dengan gagasan yang pernah dieksplisitkan oleh Lyotard (1984) yang mengungkapkan bahwa pengetahuan mesti melayani subjek. Ia adalah basis pembebasan dari opresi dan penderitaan. Definisi yang bertendensi progresif ini tidak terlepas dari esensi etimologis pendidikan. Pendidikan merupakan translasi dari kata *edukasi* yang berasal dari kata Latin *educatio* (kata kerja: *educare*). Secara harafiah edukasi berarti memimpin/menarik keluar (=ducere) dari (=ex) atau membentuk sesuai dengan keinginan hingga mendekati kesempurnaan (Bass & Wood, 2004). Kalau disimpulkan dari kata ini, isi dan tujuan akhir pendidikan adalah pembebasan masyarakat dari kebodohan, kemiskinan, penderitaan, ketertinggalan, dan situasi yang tidak atau kurang manusiawi pada umumnya.

Pendidikan tidak hanya menyangkut persoalan *teknis* tetapi juga berkaitan dengan masalah *etis*. Orientasi pendidikan tidak hanya memproduksi tenaga siap pakai melainkan pribadi-pribadi berwatak yang wujudnya antara lain adalah berani memilih atau bahkan berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan juga merupakan usaha yang bertujuan membentuk sikap dan watak kepribadian seseorang sehingga sungguh-sungguh bersifat manusiawi. Oleh karena itu, menurut Paulo Freire, pendidikan juga dipahami sebagai proses humanisasi, proses memanusiawikan manusia (Adisusilo, 2000). Definisi-definisi bertautan dengan konsep pendidikan yang dideklarasikan oleh United Nations. Dalam “*UN Universal Declaration of Human Rights* (1948, article 26, clause 2),

dinyatakan bahwa '*Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace*'. Definisi Pendidikan ini erat hubungannya dengan Pembangunan manusia secara utuh secara personal dan memperkuat dukungan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Pendidikan juga mesti mempromosikan berbagai pemahaman, toleransi dan persaudaraan di antara bangsa-bangsa, kelompok ras dan agama, dan bagaimana perjuangan mereka untuk mempertahankan perdamaian (Kusnir & Nunes, 2022).

Progresi pendidikan menjadikan seseorang memiliki karakter yang bertekuk pada kebaikan-kebaikan individual dan komunal. Pendidikan mendidik seseorang untuk mampu mengartikulasikan persoalan-persoalan sulit dan pelik dengan bahasa-bahasa sederhana, mudah dimengerti, dan penuh kesantunan. Ada etika yang membuat orang menyadari bahwa setiap pernyataan pendidik pasti memiliki nilai dan praksis yang mesti dihargai. Adagium Latin menyatakan *Verba movent exempla trahunt* - (kata-kata itu menggerakkan, namun teladan lebih memikat hati). Pendidikan adalah sesuatu yang dibahasakan dan dilaksanakan untuk menghadirkan jati diri *human* dan *conscient* seorang manusia. Oleh karena itu pendidikan sebenarnya sangat penting karena membuat seseorang makin menyadari kedalaman eksistensinya sebagai manusia.

Pendidikan selalu berusaha mengarahkan pendidik, tenaga kependidikan, dan para siswa kepada proses humanisasi dan konsientisasi. Melalui humanisasi, manusia menemukan berbagai identitasnya yang khas dan istimewa. Misalnya, manusia dikenal sebagai makhluk yang berpikir, makhluk yang bekerja, makhluk yang bersimbol, makhluk sosial dan

sebagainya. Menjadi manusia berarti selalu ada upaya untuk menemukan jati diri kemanusiaannya. Dalam konteks konsientisasi, manusia berupaya untuk selalu sadar dengan eksistensinya. Manusia sadar dirinya sebagai makhluk personal, manusia sebagai makhluk yang berpengetahuan, memiliki karakter sosialitas, dan juga makhluk yang selalu memiliki *telos* religius filosofis. Menurut Freire, manusia menemukan diri berakar dalam lingkungan ruang dan waktu yang mewarnai mereka serta mereka warnai. Manusia mengada karena dia ada dalam satu situasi. Manusia akan semakin mengada kalau dia tidak hanya berpikir kritis terhadap eksistensinya tetapi juga bertindak secara kritis terhadapnya (Freire, 2008).

Dalam konteks pendidikan yang umum, pilar-pilar pendidikan merdeka belajar selalu menuntun pendidik untuk mendidik siswa untuk belajar mengetahui (*learning to know*), belajar untuk melakukan (*learning to do*), belajar bagaimana harus hidup bersama (*learning to live together*), belajar untuk menjadi (*learning to be*). UNESCO menyebutnya sebagai empat pilar pendidikan yang mesti dimiliki guru yang kemudian dijabarkan sebagai kompetensi guru dan siswa (Sindhunata, 2000).

Konteks global yang pluralistik dan dinamik telah menghadirkan pengaruh besar dalam progresi pendidikan di Indonesia. Globalisasi dalam konteks pendidikan didefinisikan sebagai proses dimana ide-ide partikular, gambaran, dan praksis pengajaran, pembelajaran, dan sekolah berhubungan dengan interaksi mutual dan pengaruh sistem pendidikan nasional (Narwana, 2015). Pendidikan menjadi salah satu pilar yang dimintai pertanggungjawabannya ketika dinamisitas dan pluralitas justru mengarah kepada pragmatisme-pragmatisme tertentu. Sejumlah nilai yang sebelumnya dianggap sebagai habitus mengalami heterodoksi (perubahan makna dan cara) hingga berdampak pada tergerusnya sejumlah nilai. Seorang filsuf paradigmatis asal Jerman, Juergen Habermas (d'Entrèves, 2003) berpendapat bahwa salah satu tantangan dalam masyarakat modern adalah erosi nilai-nilai budaya (*erosion of traditions*).

Manifestasi-manifestasi patologis dalam dunia modern dan dunia pendidikan muncul dalam gejala hilangnya makna (*loss of meaning*) dalam wilayah reproduksi kultural dan edukasional, anomie (*anomie*) dalam wilayah integrasi sosial sekolah dan gangguan personalitas (*personality disorders*) dalam wilayah interaksi sosial. Kembali kepada orientasi dasar pendidikan, seperti yang dipopulerkan oleh Freire, merupakan esensi sekaligus praksis progresi yang mesti dimiliki oleh para pengampu kebijakan pendidikan. Para pendidik dan tenaga kependidikan memparadekan sebuah megaprojek kolaborasi untuk bisa mengembalikan pendidikan kepada kesejatiannya.

Pendidikan unggul mesti bisa merangkul manusia supaya berpikir kreatif, inovatif, dan konstruktif untuk bisa memperoleh eksistensi dalam kehidupannya. Pendidikan tidak hanya berhubungan dengan pemberdayaan rasionalitas manusia tetapi melingkupi begitu banyak aspek internal dan eksternal kehidupan. Lingkungan akademik pendidikan adalah bingkai kehidupan kaum permikir dan praktisi yang mengelaborasi berbagai jenis pengetahuan untuk diinternalisasi lalu selanjutnya diimplementasikan dalam kebijakan dan praktik-praktik tertentu. Bahkan semua jenis keputusan yang menyangkut dimensi akademis ini mesti diuji secara kritis dan rasional sehingga dipahami secara komprehensif.

Saat ini kita sudah memasuki era kurikulum merdeka belajar. Kurikulum yang dibangun untuk meretas semua sekat-sekat demografis, kultural, religius, dan geografis. Kurikulum ini membuka ruang untuk para pendidik dan siswa berelaborasi secara kreatif dan bisa mengeksplorasi berbagai pengetahuan secara optimal. Semua hal itu bisa terjadi melalui Rencana Pengembangan Sekolah yang matang dengan memperkuat kualitas pendidik, pola pembelajaran, dan mutu siswa. Pendidikan bermutu membutuhkan pendidik dan tenaga kependidikan yang bermutu. Salah satunya adalah kemampuan manajerial

kepala sekolah sebagai nahkoda atau pemimpin keberlangsungan aktivitas sekolah. Misalnya, dalam konteks kurikulum pembelajaran, kepala sekolah mesti memiliki *perencanaan* yang matang dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum semester sebelumnya, membuat regulasi berdasarkan standar-standar dalam raport mutu pendidikan, menyusun rencana pembagian mengajar, atau menyusun rencana kegiatan ekstrakurikuler. Hal yang sama juga bisa dilakukan oleh kepala sekolah terkait manajemen pengorganisasian, pendelegasian, pembimbingan, pengendalian, dan pelaporan. Berdasarkan pemahaman tersebut maka salah satu pilar mutu pendidikan adalah kemampuan manajemen yang baik dan berdampak pada pengembangan sekolah. Black dan Mouton berargumentasi bahwa karakter kepemimpinan merupakan faktor signifikan untuk keberhasilan atau kegagalan sekolah. Oleh karena itu sangat penting juga menciptakan sistem yang bisa mendukung pengembangan kualitas manajemen dan kepemimpinan (Pansiri, 2011)

Di sisi lain standar mutu juga berhubungan dengan kuantitas dan kualitas guru. Guru bermutu menjamin relasi profesional dengan siswa dalam bentuk pemahaman komprehensif tentang aspek-aspek psikologis seperti mengenal siswa dengan baik, menyiapkan dengan baik perangkat dan media pembelajaran, disiplin, taat pada kode etik, memiliki kemampuan literasi yang baik, dan lain sebagainya. Guru bermutu juga memiliki kompetensi pedagogis yang memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif, kritis, mampu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan peserta didik dan juga para pendidik lainnya. Merujuk pada Pukelis dan Semtona, kompetensi berhubungan dengan skill, sikap, pengetahuan, kepemimpinan, pengetahuan, dan pemahaman (Korbet, 2023). Konsep Kreativitas berhubungan dengan kemampuan melahirkan gagasan dan *prototype-prototype* baru. Berkomunikasi berhubungan dengan jalinan relasi dengan siswa dan rekan sejawat. Bernalar kritis adalah cara berpikir yang bertujuan, berbasis regulasi, teori,

konsep, dan hasil analisis terhadap data, serta menggunakan berbagai media yang jelas dan terukur. Kolaborasi bserhubungan dengan kemampuan guru untuk bekerjasama dalam pembelajaran kelompok yang melibatkan siswa. Keempat kemampuan ini dilihat sebagai *skill* yang sangat relevan. Para siswa dituntut untuk memiliki kemampuan spesifik sehingga bisa membuat keputusan-keputusan profesional dan menemukan solusi-solusi implementatif (Chernikova, 2020). Mutu pedagogis dan psikologis perlu didukung dengan kompetensi profesional dengan memahami dan menguasai materi ajar, sering mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi pembelajaran, bekerjasama dengan rekan sejawat, aktif melakukan penelitian, dan mempublikasikan karya-karya pada jurnal atau buku. Deskripsi-deksripsi ini masih belum sepenuhnya dimiliki oleh para guru yang ada di SMPN 13 Borong. Oleh karena itu proses pendampingan yang terwujud dalam penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah merupakan kagiatan yang mesti dijalankan untuk meningkatkan mutu sekolah dan juga termasuk mutu guru.

Merespons urgensi tersebut, Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Unika Santu Paulus Ruteng bersinergi dengan SMPN 13 Borong, Kabupaten Manggarai Timur, untuk menginisiasi program pendampingan penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS). Kegiatan ini dirancang secara konkret untuk mendukung sekolah dalam mewujudkan tata kelola institusi yang visioner dan terukur.

Melalui penyusunan RPS yang komprehensif, pendampingan ini bertujuan untuk menetapkan arah pengembangan sekolah dalam jangka menengah dan panjang, menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP), serta mengoptimalkan alokasi sumber daya sekolah secara efektif. Lebih jauh lagi, RPS ini diproyeksikan sebagai instrumen strategis untuk mentransformasi SMPN 13 Borong menjadi lembaga pendidikan yang adaptif terhadap dinamika zaman, fokus pada peningkatan mutu

pembelajaran, dan mampu memberikan layanan pendidikan yang akuntabel bagi masyarakat di wilayah Borong.



Gambar 1.
Siklus Perencanaan Strategis

Kita bisa menghubungkan tahapan Siklus Perencanaan Strategis tersebut secara spesifik ke dalam penyusunan draf Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) untuk SMPN 13 Borong.

Berikut adalah langkah-langkah implementasinya:

1. *Analyze Position (Analisis Posisi)*. Pada tahap ini, sekolah tidak hanya melihat hasil rapor pendidikan, tetapi juga memetakan kondisi nyata di lapangan.
2. *Prioritize Criteria (Prioritaskan Kriteria)*. Karena sumber daya sekolah (dana BOS, tenaga guru, waktu) terbatas, SMPN 13 Borong harus memilih aspek apa yang paling mendesak untuk diperbaiki dalam 1-4 tahun ke depan.
3. *Define Goals (Tentukan Tujuan)*. Tujuan harus spesifik dan menjawab masalah yang ditemukan pada tahap analisis.
4. *Define Accountability (Tentukan Akuntabilitas)*. Rencana tidak akan berjalan tanpa pembagian tugas yang jelas. Pihak sekolah perlu menentukan siapa bertanggung jawab atas apa. Misalnya, Kepala Sekolah bertanggung jawab atas supervisi akademik, sedangkan guru kelas bertanggung jawab atas implementasi strategi komunikasi verbal dan nonverbal di kelas. Ini menciptakan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
5. *Review (Tinjauan/Evaluasi)*. Tahap ini memastikan bahwa RPS bukan sekadar dokumen mati, melainkan panduan yang dinamis. Oleh karena itu sangat penting

melakukan evaluasi berkala (per semester atau per tahun) melalui observasi kelas dan wawancara dengan *stakeholder* untuk melihat apakah interaksi sosial dan hasil belajar siswa benar-benar meningkat.

Analisis situasi dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap berbagai pemangku kepentingan di SMPN 13 Borong, termasuk guru, kepala sekolah, siswa, dan orang tua. Hasil analisis ini mengonfirmasi bahwa sekolah belum memiliki RPS baku yang bisa menuntun kegiatan sekolah ke depannya.

Meskipun demikian, SMPN 13 Borong sebenarnya telah memiliki inisiatif untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk mendukung pengembangan sekolah. Oleh karena itu untuk menyokong niat praktik baik sekolah dan terwujudnya penyusunan RPS yang bermutu, tim PkM melakukan kegiatan pendampingan penyusunan RPS di SMPN 13 Borong.

METODE

Guna mengatasi kompleksitas manajemen institusi yang teridentifikasi di SMPN 13 Borong, tim PkM mengadopsi pendekatan partisipatif melalui kerangka *Participatory Action Research* (PAR). Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi relevan dengan kebutuhan dan konteks lokal, serta menumbuhkan rasa kepemilikan yang kuat dari seluruh warga sekolah terhadap visi pengembangan yang disusun.

PAR dicirikan oleh fokusnya pada konstruksi pengetahuan dan tindakan kolaboratif, di mana tim PkM bertindak sebagai fasilitator dan komunitas sekolah menjadi rekan konstruktor dalam setiap tahapan strategis. Dalam konteks ini, individu tidak dianggap sebagai objek studi, melainkan subjek aktif yang terlibat langsung mulai dari analisis masalah (Evaluasi Diri Sekolah), pendefinisian tujuan jangka menengah, hingga pengorganisasian program kerja tahunan.

Metode pelaksanaan kegiatan meliputi beberapa kegiatan berikut.

1. *Focus Group Discussion* (FGD)

Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) merupakan fase krusial dalam tahapan pengumpulan data dan identifikasi masalah strategis di SMPN 13 Borong. Forum ini melibatkan Kepala Sekolah, jajaran guru, serta operator sekolah sebagai informan kunci. Melalui FGD, para partisipan didorong untuk mendeskripsikan secara komprehensif terkait persepsi, pengalaman empiris, serta ekspektasi mereka terhadap pengembangan sekolah ke depan. Proses ini secara fundamental membantu tim PkM dalam melakukan analisis posisi (*analyze position*) guna memetakan kondisi eksisting sekolah secara akurat. Data yang dihimpun dalam FGD berfungsi sebagai basis empiris dalam merumuskan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) yang tidak hanya relevan, tetapi juga aplikatif terhadap konteks lokal. Pendekatan partisipatif ini selaras dengan temuan Mardiana (2021) yang menegaskan efektivitas FGD sebagai instrumen penggalan informasi kualitatif yang mendalam untuk keperluan pengembangan kebijakan sekolah.

2. *Ceramah dan Sosialisasi*

Pasca pelaksanaan FGD, tim PkM menyelenggarakan sesi ceramah dan sosialisasi sebagai penguatan landasan teoretis dan yuridis bagi para peserta. Sesi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai regulasi nasional yang mendasari pentingnya Rencana Pengembangan Sekolah (RPS). Secara legal-formal, penyusunan RPS merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan, yang mewajibkan sekolah memiliki rencana kerja jangka menengah (empat tahun) dan rencana kerja tahunan. Selain itu, materi sosialisasi juga merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) guna menjamin bahwa setiap program pengembangan di SMPN 13

Borong selaras dengan standar mutu nasional.

Dalam sesi ini, dipaparkan pula bahwa penyusunan RPS di SMPN 13 Borong harus mengintegrasikan empat pendekatan utama dalam perencanaan pendidikan sebagai berikut.

- a. Pendekatan Partisipatif: Melibatkan seluruh *stakeholder* sekolah (guru, komite, dan orang tua) untuk menjamin akuntabilitas dan rasa kepemilikan terhadap visi sekolah.
- b. Pendekatan *Top-Down* dan *Bottom-Up*: Mensinergikan kebijakan dari otoritas pendidikan pusat (regulasi pemerintah) dengan aspirasi serta kebutuhan riil yang muncul dari bawah (warga sekolah).
- c. Pendekatan Berbasis Data: Menggunakan hasil Rapor Pendidikan dan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) sebagai pijakan utama dalam menentukan prioritas program, sehingga rencana yang disusun bersifat objektif dan tidak spekulatif.
- d. Pendekatan Strategis: Menganalisis kondisi eksisting untuk memetakan posisi sekolah saat ini dan menentukan langkah-langkah taktis dalam mencapai tujuan jangka panjang institusi secara efektif.
- e. Melalui sosialisasi ini, para peserta diharapkan tidak hanya memahami aspek administratif penyusunan RPS, tetapi juga mampu menginternalisasi filosofi perencanaan yang visioner demi peningkatan kualitas pembelajaran di SMPN 13 Borong secara berkelanjutan.
- f. *Penyusunan Dokumen Rencana Pengembangan Sekolah (RPS)*

Berdasarkan hasil pemetaan akar masalah melalui FGD serta internalisasi regulasi nasional, tim PkM bersama *stakeholder* SMPN 13 Borong melangkah ke tahap penyusunan draf dokumen RPS. Proses *drafting* dilakukan secara kolaboratif dan partisipatif untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dirumuskan bersifat aplikatif dan akuntabel. Dokumen RPS yang disusun secara sistematis mencakup komponen-komponen strategis sebagai berikut:

- 1) *Penyelarasan Visi, Misi, dan Tujuan*

Sekolah: Melakukan reorientasi visi dan misi agar tetap relevan dengan dinamika pendidikan kontemporer serta selaras dengan karakter sosiokultural lingkungan SMPN 13 Borong.

- 2) *Landasan Filosofis dan Yuridis*: Menetapkan dasar hukum dan tujuan pengembangan sebagai koridor utama dalam setiap pengambilan kebijakan sekolah.
- 3) *Analisis Kondisi Lingkungan Strategis*: Mengidentifikasi faktor eksternal (peluang dan tantangan) yang memengaruhi eksistensi sekolah di tengah masyarakat Borong.
- 4) *Analisis Situasi Satuan Pendidikan (Internal)*: Melakukan evaluasi mendalam terhadap kekuatan dan kelemahan internal sekolah, termasuk pemetaan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana, dan pembiayaan.
- 5) *Analisis Pendidikan Masa Mendatang*: Memproyeksikan kebutuhan dan tantangan pendidikan dalam kurun waktu empat tahun ke depan, termasuk integrasi keterampilan abad ke-21 (4C) dalam kurikulum.
- 6) *Penentuan Skala Prioritas Pengembangan Sekolah*: Mengklasifikasikan program pengembangan berdasarkan urgensi dan ketersediaan sumber daya untuk menjamin efektivitas implementasi.
- 7) *Formulasi Rencana Aksi Sekolah (Action Plan)*: Menyusun matriks kerja yang meliputi sasaran, indikator keberhasilan, penanggung jawab, serta jadwal pelaksanaan kegiatan secara mendetail.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini dimulai dengan koordinasi awal antara tim PkM dan pimpinan SMPN 13 Borong untuk menyepakati jadwal dan rangkaian kegiatan. Tahap ini krusial untuk membangun komitmen dan dukungan dari pihak sekolah.

1. Temuan dari Focus Group Discussion (FGD)

Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan bersama pemangku kepentingan di SMPN

13 Borong, ditemukan beberapa kondisi riil yang menjadi dasar urgensi penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS). Temuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. *Absensi Dokumen Strategis Formal:* SMPN 13 Borong belum memiliki dokumen Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) yang komprehensif dan tertulis. Ketiadaan dokumen ini menyebabkan sekolah belum memiliki panduan jangka menengah dan panjang yang terstruktur dalam mencapai visi dan misinya.
- b. *Manajemen Operasional Berbasis Insidental:* Berbagai kegiatan sekolah selama ini dijalankan berdasarkan temuan atau kebutuhan mendesak yang dibahas dalam rapat internal. Hal ini mengindikasikan bahwa manajemen sekolah cenderung bersifat reaktif daripada proaktif dan terencana.
- c. *Koordinasi Internal yang Belum Optimal:* Temuan FGD menunjukkan bahwa alur koordinasi antarwarga sekolah masih perlu ditingkatkan. Belum maksimalnya koordinasi ini seringkali menghambat efektivitas pelaksanaan program-program sekolah.
- d. *Keterbatasan Dokumentasi dan Administrasi:* Selain RPS, administrasi pendukung lainnya seringkali belum terdokumentasi dengan rapi sesuai standar pengelolaan pendidikan.
- e. Implementasi Sosialisasi dan Penyusunan RPS



Gambar 2.
Dengar pendapat bersama Kepala Sekolah

Tahap implementasi merupakan inti dari kegiatan pengabdian yang bertujuan untuk mentransformasi tata kelola sekolah dari pola insidental menjadi pola terencana yang berbasis data. Pelaksanaan kegiatan ini dibagi ke dalam dua fase utama, yakni sosialisasi regulasi dan pendampingan penyusunan dokumen teknis.

1. Sosialisasi dan Penguatan Landasan Yuridis

Kegiatan dimulai dengan pemaparan materi mengenai urgensi Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) sesuai amanat Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan. Sosialisasi ini bertujuan menyamakan persepsi antara tim pengabdian dan mitra mengenai posisi RPS sebagai instrumen vital dalam menjamin mutu pendidikan secara berkelanjutan. Materi ditekankan pada pentingnya sinkronisasi antara program sekolah dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) serta pemanfaatan data riil sekolah sebagai pijakan utama dalam setiap perencanaan.

2. Identifikasi Kondisi Objektif dan Masalah Strategis

Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD), ditemukan bahwa SMPN 13 Borong selama ini beroperasi tanpa dokumen panduan strategis yang formal. Pengelolaan sekolah cenderung bersifat reaktif, di mana setiap kebijakan diambil berdasarkan kesepakatan rapat internal saat terjadi masalah atau kebutuhan mendesak. Selain itu, ditemukan kendala dalam alur koordinasi internal serta ketimpangan dalam pembagian beban tugas guru, khususnya pada kegiatan ekstrakurikuler. Temuan ini menjadi titik tolak bagi peserta untuk memahami bahwa RPS bukan sekadar beban administratif, melainkan solusi atas disfungsi organisasi yang selama ini terjadi.



Gambar 3
Foto bersama Tim PkM dan Guru-Guru
SMPN 13 Borong

3. Pendampingan Penyusunan Dokumen (*Drafting*)

Proses penyusunan draf RPS dilakukan melalui pendekatan partisipatif, di mana tim PkM berperan sebagai fasilitator dan komunitas sekolah (kepala sekolah, guru, dan komite) sebagai subjek pengembang. Penyusunan dokumen mengikuti alur perencanaan strategis yang sistematis, meliputi:

- Rekonstruksi Visi dan Misi: Menyelaraskan visi sekolah dengan tuntutan pendidikan modern agar lebih relevan dan terukur.
- Analisis Situasi (Internal dan Eksternal): Melakukan pemetaan kekuatan dan tantangan sekolah untuk menentukan posisi strategis lembaga.
- Penentuan Skala Prioritas: Mengonversi temuan masalah (seperti masalah koordinasi dan distribusi tugas) menjadi program kerja prioritas.
- Formulasi Rencana Aksi (*Action Plan*): Menyusun matriks kerja tahunan yang mencakup rincian kegiatan, indikator keberhasilan, hingga sistem akuntabilitas penanggung jawab.

4. Refleksi dan Validasi

Tahap akhir dari implementasi ini adalah peninjauan bersama atas draf yang telah disusun. Melalui diskusi reflektif, warga sekolah mengevaluasi apakah rencana aksi yang dibuat mampu menjawab tantangan distribusi

tugas yang tidak merata dan koordinasi yang lemah. Hasil akhir dari proses ini adalah dokumen RPS yang sah, yang diharapkan mampu menjadi kompas bagi SMPN 13 Borong dalam mewujudkan tata kelola sekolah yang lebih akuntabel, terstruktur, dan transparan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan beberapa luaran konkret dan dampak positif, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Luaran utama dari kegiatan ini meliputi:

- a. Dokumen Rencana Pengembangan Sekolah SMPN 13 Borong. Ini adalah produk paling substansial dari kegiatan ini, yang akan menjadi panduan operasional bagi seluruh warga sekolah. Dokumen ini terstruktur, komprehensif, dan relevan dengan regulasi terkini.
- b. Peningkatan Pemahaman Guru dan Orang Tua: Melalui FGD dan sosialisasi, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman guru tentang orientasi rencana pengembangan sekolah.
- b. Luaran ini menunjukkan bahwa PkM tidak hanya menghasilkan dokumen atau laporan, tetapi juga instrumen operasional yang mendorong perubahan pengembangan sekolah. RPS, dalam konteks ini, bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai tujuan sekolah yang lebih baik.

Dampak kegiatan dapat dilihat dalam dua perspektif waktu, yaitu dampak jangka pendek dan dampak jangka Panjang. Secara jangka pendek kegiatan ini berdampak pada:

- a. Peningkatan Kesadaran Warga Sekolah: Adanya pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya kegiatan sekolah sesuai dengan rencana pengembangannya.
- b. Pergeseran Paradigma: Mulai terjadinya pergeseran pandangan dari melihat kegiatan sekolah sebagai sesuatu yang rutin menjadi kegiatan yang terstruktur dan tersistematisasi dengan baik.
- c. Dasar Implementasi Awal: Sekolah kini memiliki dasar yang kuat untuk memulai implementasi praktik

pengembangan sekolah secara terstruktur.

Sementara secara jangka panjang kegiatan ini diharapkan berdampak sebagai berikut:

- a. Terciptanya Lingkungan Belajar yang Aman dan Nyaman: Diharapkan implementasi RPS secara konsisten akan menciptakan suasana sekolah yang kondusif untuk proses belajar mengajar, di mana siswa merasa aman, baik dari segi perencanaan proses belajar, pengembangan sekolah, dan tercapainya tujuan visi misi sekolah.
- b. Peningkatan Kualitas Pendidikan: Lingkungan yang aman akan mendukung peningkatan motivasi belajar siswa dan kinerja guru.
- c. Model Bagi Sekolah Lain: RPS yang telah disusun di SMPN 13 Borong berpotensi menjadi model atau best practice bagi sekolah-sekolah lain di Kabupaten Manggarai Timur, dalam upaya mereka untuk menyusun panduan serupa. Program serupa telah terbukti dapat menjadi model bagi perguruan tinggi lain dalam pengabdian masyarakat berbasis edukasi dan perencanaan. Ini mendukung upaya pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang terstruktur dan memperhatikan rapor mutu pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa dampak proyek melampaui SMPN 13 Borong, berpotensi menjadi katalis bagi perubahan regional yang lebih luas.



Gambar 4. Profil Visi Misi SMPN 13 Borong

SIMPULAN DAN SARAN

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (RPS) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di SMPN 13 Borong, Kabupaten Manggarai Timur, telah berhasil dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Kegiatan ini merupakan respons terhadap fenomena tidak adanya rencana pengembangan sekolah yang terstruktur dan sistematis. Dokumen RPS yang dihasilkan telah disepakati oleh pihak sekolah dan diharapkan menjadi acuan resmi untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang aman, nyaman, dan berorientasi pengembangan.

Luaran utama kegiatan ini meliputi dokumen RPS, peningkatan pemahaman guru dan orang tua terkait rencana pengembangan sekolah. Dampak yang diharapkan adalah peningkatan kesadaran warga sekolah, pergeseran budaya, dan terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Evaluasi menunjukkan antusiasme dan komitmen tinggi dari sekolah untuk mengimplementasikan RPS. Tujuan utama PkM adalah bukan hanya intervensi yang berhasil, tetapi juga institusionalisasinya dalam organisasi mitra. Kesepakatan terhadap RPS sebagai "acuan resmi" dan "antusiasme dan komitmen tinggi" yang diamati menunjukkan bahwa kerangka pengembangan sekolah mulai tertanam dalam budaya operasional SMPN 13 Borong. Ini menggeser proyek dari intervensi eksternal sementara menjadi mekanisme internal yang permanen dan mandiri, secara signifikan meningkatkan dampak jangka panjangnya dan berfungsi sebagai contoh kuat dari pengabdian masyarakat yang efektif. Diharapkan RPS ini tidak hanya efektif di SMPN 13 Borong tetapi juga dapat menjadi model bagi sekolah lain di wilayah Manggarai Timur untuk mewujudkan pendidikan yang berorientasi pengembangan sekolah.

Untuk memastikan keberlanjutan dan dampak yang lebih luas dari inisiatif ini, beberapa saran strategis dapat diajukan:

1. Untuk SMPN 13 Borong:
 - a. Mempertahankan dan Memperdalam Implementasi RPS:

- Direkomendasikan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas RPS, dengan tinjauan dan pembaruan berkala untuk memastikan relevansi dan responsivitasnya terhadap isu-isu yang muncul.
- b. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan: Mengadakan pelatihan reguler dan terarah bagi guru dan bahkan siswa mengenai aspek-aspek spesifik rencana pengembangan sekolah. Ini akan memenuhi kebutuhan pengembangan keterampilan dan penguatan yang berkelanjutan, sejalan dengan pendekatan preventif, kuratif, dan orientatif.
2. Untuk Pemerintah Daerah/Otoritas Pendidikan:
 - a. Replikasi dan Skala: Merekomendasikan RPS SMPN 13 Borong dan model PkM partisipatif sebagai cetak biru bagi sekolah-sekolah lain di Kabupaten Manggarai Timur. Ini mendukung tujuan yang lebih luas untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang berbasis pada rencana pengembangan.
 - b. Dukungan Kebijakan dan Sumber Daya: Mengadvokasi dukungan pemerintah daerah dalam bentuk sumber daya, pendanaan, dan penegakan kebijakan untuk memfasilitasi adopsi dan implementasi RPS serupa yang efektif di sekolah lain.
 - c. Kolaborasi dengan Universitas: Mendorong kolaborasi berkelanjutan antara otoritas pendidikan lokal dan universitas (seperti Unika Santu Paulus Ruteng) untuk inisiatif PkM di masa depan, memanfaatkan keahlian akademik untuk pengembangan komunitas berbasis bukti.

Dengan merekomendasikan model SMPN 13 Borong untuk "replikasi dan skala" serta mengadvokasi "dukungan kebijakan dan sumber daya" dari pemerintah daerah, laporan ini

secara implisit mengusulkan pergeseran dari "praktik terbaik" lokal yang berhasil menuju potensi reformasi sistemik. Hal ini menunjukkan bahwa dampak PkM dapat melampaui sekolah individu dan berkontribusi pada kebijakan dan praktik pendidikan yang lebih luas, memengaruhi bagaimana pencegahan kekerasan didekati di seluruh wilayah atau bahkan secara nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisusilo, J.R. Sutarjo. (2000). "Pendidikan Nilai dalam Ilmu-Ilmu Sosial-Humaniora". A. Atmadi & Y. Setyaningsih (ed.), *Transformasi Pendidikan Memasuki Milenium Ketiga*, Yogyakarta: Kanisus.
- Bass, Randall V., & J.W. Good. (2004). Educare and Educere: Is a Balance Possible in The Educational System? *The Educational Forum*, 68 (2), 161-168. DOI: [10.1080/00131720408984623](https://doi.org/10.1080/00131720408984623)
- Chernikova, Olga, at.al. (2020). Simulation-Based Learning in Higher Education: A Meta-Analysis. *Review of Educational Research*. Vol. 90, No. 4, pp. 499-541. DOI: <https://doi.org/10.3102/0034654320933544>
- Corbett, Stephen. (2023). Developing contextualised literature-informed competency frameworks for middle managers in education. *Educational Management Administration & Leadership*, Vol. 51(6) 1401-1421. DOI: 10.1177/17411432211043873
- Freire, Paulo. (2004). *Politik Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Freire, Paulo. (2008). *Pendidikan Kaum Tertindas*, Jakarta: LP3S.
- Kushnir, Iryna & Nunes. (2022). Education and the UN Development Goals Projects (MDGs and SDGs): Definitions, Links, Operationalisations. *Journal of Research in International Education*. Vol. 21(1) 3-21. DOI: 10.1177/14752409221088942
- Lyotard, Jean-François. (1984). *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*. Minneapolis:

- University of Minnesota Press.
- Narwana, Kamlesh. (2015). A global approach to school education and local reality: A case study of community participation in Haryana, India. *Policy Futures in Education*. Vol. 13(2) 219–233. DOI: 10.1177/1478210314568242.
- Pansiri, Nkobi Owen. (2011). Performativity in School Management and Leadership in Botswana. *Educational Management Administration & Leadership*. 39(6) 751–766. DOI: 10.1177/1741143211416386
- Passerin d'Entrèves, Maurizio. (2023). *Filsafat Politik Hannah Arendt*. Terj. M. Shafwan. Yogyakarta: Qalam.
- Sindhunata (ed.). (2000). *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius.